

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang banyak diketahui, dinamika politik internasional telah menciptakan banyak peristiwa-peristiwa yang berdampak ke banyak aspek di kehidupan sistem internasional. Secara mendasar, sistem internasional memiliki beberapa aktor yang dibagi menjadi dua jenis yakni aktor negara dan non-negara (organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu).¹ Salah satu peristiwa yang sering kali terjadi adalah tidak terjalinnya kerja sama dengan berbagai macam latar belakang alasan yang berlanjut hingga muncul gejala-gejala konflik antar aktor. Dalam studi hubungan internasional, tentu hal tersebut sangat wajar terjadi karena tidak semua aktor memiliki pemahaman yang sama tentang suatu hal. Salah satu konflik yang banyak dibahas dalam studi hubungan internasional adalah konflik antara Rusia dan Ukraina.

Apabila dilihat dari sisi sejarahnya Ukraina merupakan negara bekas bagian Uni Soviet pada masa sebelum perang dingin yang kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 1991.² Dari peristiwa perpecahan Uni Soviet dan keputusan untuk merdeka inilah yang menyebabkan unsur politik di Ukraina kurang memiliki unsur stabilitas. Kondisi politik di Ukraina banyak terganggu dengan ideologi-ideologi Pro-Rusia yang terbentur

¹ Kan, H. (2011). ACTORS IN WORLD POLITICS.

² Fitzgerald, M., (2022). Russia Invades Ukraine: A Timeline of the Crisis. US News. <https://www.usnews.com/news/best-countries/slideshows/a-timeline-of-the-russia-ukraine-conflict?> diakses pada 20 March 2022.

dengan nasionalisme Ukraina yang menyebabkan timbulnya perbedaan di tengah-tengah masyarakatnya³. Kondisi ini terus terjadi hingga banyak konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, salah satunya yang terjadi pada tahun 2015 ketika Rusia merebut Krimea dari Ukraina⁴.

Peristiwa yang terjadi pada tahun 2015 tersebut terulang dengan skala konflik yang lebih besar pada awal tahun 2022. Tepatnya pada 24 Februari 2022, Rusia dengan dikomando langsung oleh presidennya yakni Vladimir Putin melancarkan agresi militer kepada Ukraina sebagai ujung dari permasalahan-permasalahan antara Rusia dan Ukraina yang tidak kunjung terselesaikan.⁵ Sejatinya, Presiden Putin tidak mendefinisikan kebijakannya sebagai langkah menginvasi Ukraina akan tetapi disebutnya sebagai operasi militer khusus untuk demiliterisasi Ukraina yang mengancam Rusia serta misi pemberantasan Nazism.⁶ Permasalahan-permasalahan di antaranya adalah menyangkut isu geopolitik kedua negara dan ditambah juga dengan isu lawas mengenai ideologi yang dibawa oleh Amerika Serikat dalam *The North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang bukan merupakan aliansi Rusia.

Operasi militer Rusia kepada Ukraina mengundang banyak kecaman dari berbagai negara khususnya yang merupakan anggota NATO, *European Union*

³ Agnieszka Pikulicka-Wilczewska, R., (2015). *Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives*. Bristol: E-International Relations Publishing, pp.101-109.

⁴ Fitzgerald, M., (2022). *Russia Invades Ukraine: A Timeline of the Crisis*. US News. <https://www.usnews.com/news/best-countries/slideshows/a-timeline-of-the-russia-ukraine-conflict?> diakses pada 20 March 2022.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Bloomberg, 2022. Transcript: Vladimir Putin's Televised Address on Ukraine. [online] Bloomberg.com. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-24/full-transcript-vladimir-putin-s-televised-address-to-russia-on-ukraine-feb-24> diakses pada 20 March 2022.

(EU) dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kecaman ini tentunya mengarah langsung kepada Presiden Putin yang menggeser nilai kemanusiaan dalam kebijakannya kepada Ukraina. Para pengecam tindakan Putin ini pun menggeser istilah yang digunakan Rusia dalam peristiwa ini yang dianggap sebagai operasi militer khusus menjadi tindakan menginvasi Ukraina.

Dengan hadirnya kecaman negara-negara lain atas tindakan Rusia, konflik yang hanya terjadi antar dua negara menjadi meluas dengan tambahan-tambahan dukungan untuk kedua belah pihak yang berkonflik. Apabila melihat sejarahnya, Rusia memiliki hubungan yang sangat dinamis dengan Amerika Serikat, dengan hadirnya konflik dengan Ukraina ini membuat hubungan keduanya semakin keruh. Memanasnya hubungan Amerika dan Rusia ini dilegitimasi dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Joe Biden untuk merespon tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Salah satu ultimatumnya pada tanggal 19 Januari 2022 yakni:

“President Biden has been clear with the Russian President: If any Russian military forces move across the Ukrainian border, that’s a renewed invasion, and it will be met with a swift, severe, and united response from the United States and our Allies.”⁷

Pada kutipan yang diucapkan langsung oleh *press secretary* tersebut mengindikasikan bahwa Amerika, NATO, dan EU telah mendesak Rusia untuk tidak melakukan agresi militer sejak awal. Hal tersebut tentunya berlanjut ketika Presiden Putin memulai operasinya pada 24 Februari 2022. Presiden Biden

⁷ Psaki, J., 2022. Statement from Press Secretary Jen Psaki on Russian Aggression Towards Ukraine. The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/19/statement-from-press-secretary-jen-psaki-on-russian-aggression-towards-ukraine/> diakses pada 24 Maret 2022.

merespon hal tersebut dengan tetap pada keputusannya pada bulan sebelumnya yakni akan menjatuhkan sanksi kepada Rusia beserta semua individu yang berhubungan langsung dengan oligarki Kremlin.⁸

Merujuk pada rilisan pers oleh Gedung Putih yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak sendiri dalam melakukan semua kecaman dan sanksi kepada Rusia, melainkan dengan para sekutunya. Berbulan-bulan sebelumnya Amerika telah membangun aliansi yang merepresentasikan lebih dari setengah ekonomi global, di antaranya adalah dua puluh tujuh anggota EU (termasuk Perancis, Jerman dan Italia); Britania Raya; Kanada; Jepang; Australia; Selandia Baru; dkk.⁹ Masuknya para aliansi demi mendukung Ukraina untuk mempertahankan teritorinya ini menimbulkan dampak yang signifikan bagi Rusia khususnya di bidang ekonomi. Hal ini dikaitkan dengan penggabungan kebijakan domestik untuk melawan dominasi Rusia di negara-negara aliansi Amerika.

Salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah Britania Raya atau *United Kingdom* (UK), yang mana meluncurkan beragam kebijakan untuk menunjukkan bahwa agresi militer akan berdampak sangat masif kepada kehidupan politik; sosial dan ekonomi kepada Rusia sendiri. Salah satu kebijakan yang sangat populer dibicarakan adalah keputusan Perdana Menteri (PM) Boris Johnson yang memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia secara menyeluruh.¹⁰ Sanksi yang

⁸ The White House, 2022. Remarks by President Biden on Russia's Unprovoked and Unjustified Attack on Ukraine. The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/24/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/> diakses pada 24 Maret 2022.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ United Kingdom Government, 2022. Prime Minister's address to the nation on the Russian invasion of Ukraine: 24 February 2022. GOV.UK.

dijalankan oleh UK tersebut memiliki cakupan yang sangat luas, salah satunya pada aspek investasi. Dengan ini, UK mengklaim telah memimpin upaya sanksi internasional untuk membatasi investasi yang berhubungan langsung dengan stabilitas ekonomi Rusia. Perubahan kebijakan ini tentunya merupakan langkah intervensi ekonomi yang dilakukan pemerintah UK khususnya dalam aspek *Foreign Direct Investments* (FDI) yang dijalankan individu Rusia yang berentitas tertentu di Britania Raya.

Dalam daftar individu dan entitas yang disanksi pemerintah UK, terdapat salah satu nama yakni Roman Abramovich. Secara singkat, Abramovich merupakan salah satu individu yang diindikasikan memiliki bisnis yang menguntungkan Kremlin. Dalam laporan yang dirilis oleh pemerintah UK, Abramovich yang masuk dalam tujuh individu paling berpengaruh dalam oligarki tersebut memiliki saham di perusahaan baja besar yakni Evraz dan Norilsk Nickel serta merupakan pemilik klub papan atas sepak bola Inggris Chelsea Football Club.¹¹ Menurut Forbes dan data pemerintah UK, Abramovich memiliki kekayaan sebesar £9,4 miliar serta menjadi salah satu dari sedikit oligarki yang mempertahankan pengaruhnya dari tahun 1990-an.

Sanksi ekonomi yang diberikan dalam kebijakan luar negeri Inggris ini tentu tidak hanya berdampak pada individu dan pemerintah Rusia secara inklusif, akan tetapi juga berdampak pada jalannya bisnis yang dipegang oleh individu

<https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-address-to-the-nation-on-the-russian-invasion-of-ukraine-24-february-2022> diakses pada 24 Maret 2022.

¹¹ United Kingdom Government, 2022. Abramovich and Deripaska among 7 oligarchs targeted in estimated £15 billion sanction hit. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/news/abramovich-and-deripaska-among-seven-oligarchs-targeted-in-estimated-15bn-sanction-hit> diakses pada 24 Maret 2022.

salah satunya Abramovich dengan Chelsea FC. Chelsea FC yang telah bertransformasi menjadi brand global yang mencatatkan namanya sebagai klub kedua dengan basis penggemar terbesar di Inggris (estimasi sejumlah 135 juta penggemar) ikut merasakan dampak dari sanksi yang diberikan kepada pemiliknya.¹²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut, muncullah sebuah pertanyaan yang kemudian menjadi rumusan masalah dari penelitian yang akan dikerjakan oleh penulis: **Bagaimana prosedur pemberian sanksi ekonomi oleh Britania Raya kepada Rusia dalam konflik Rusia-Ukraina tahun 2022?**

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan umum dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 jurusan Hubungan Internasional.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur sanksi ekonomi yang digunakan Britania Raya untuk rezim Rusia dalam merespon konflik Rusia-Ukraina Tujuan ini tentunya berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan penulis sebelumnya.

¹² Hayward, J., 2022. Power Ranking Each English Premier League Team's Fanbase. Bleacher Report. <https://bleacherreport.com/articles/1785620-power-ranking-each-english-premier-league-teams-fan-base>. Diakses pada 24 Maret 2022.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

1.4.1.1 *Coercive Diplomacy*

Sebagai aktor utama dalam tatanan sistem internasional, suatu negara harus memiliki tujuan yang jelas khususnya ketika berinteraksi dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan alat yang digunakan negara demi meraih tujuan-tujuannya yang telah direncanakan. Dalam studi hubungan internasional alat tersebut disebut dengan diplomasi. Dalam publikasinya Constantinou, Kerr dan Sharp menjelaskan bahwa diplomasi diidentifikasi sebagai instrumen atau media bagi negara dalam lingkup representasi, inklusivitas, dan tujuan.¹³ Dalam buku *The Handbook of Diplomacy*, diplomasi juga dipelajari selaras dengan subjek-subjek lain seperti kebijakan luar negeri, *state communications*, dan tentu hubungan antar negara. Dengan demikian dapat dipahami bahwa diplomasi memiliki peranan penting baik kepada aktor negara maupun non-negara, hal ini disebabkan juga karna hubungan antar aktor yang saling terkait dalam sistem internasional.

Dalam diplomasi sendiri terpecah menjadi banyak jenis, yang mana dipecahan-pecahan tersebut terdapat ciri khas dan tujuan masing-masing yang unik. Salah satunya yakni diplomasi koersif atau *coercive diplomacy*, yang mana merupakan jenis diplomasi yang cukup familiar di kalangan peneliti hubungan internasional. Ketika membahas mengenai diplomasi koersif, maka akan sangat

¹³ Constantinou, C., Kerr, P., & Sharp, P. (2016). *The SAGE handbook of diplomacy*. London: SAGE Publication.

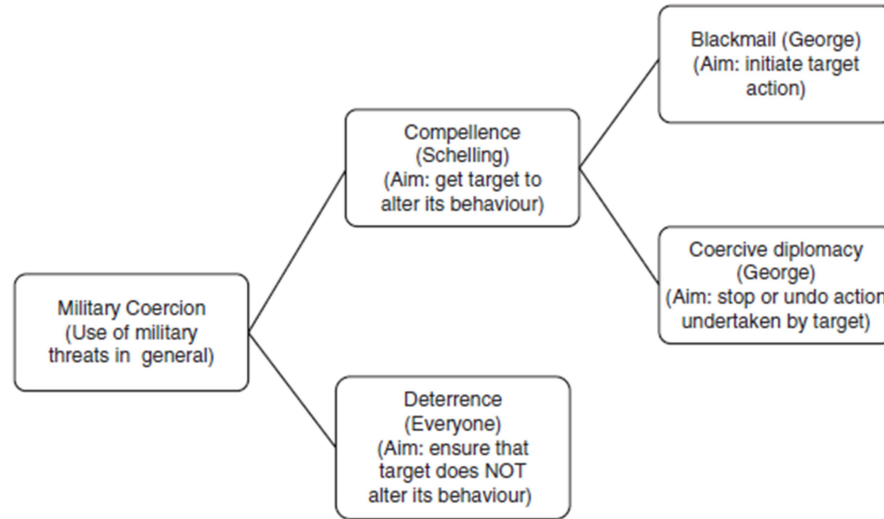
erat kaitannya dengan ikutnya pembahasan mengenai militer. Hal ini disebabkan oleh konseptualisasi diplomasi koersif pada mulanya yang memunculkan aspek militer menjadi instrumen utama dalam diplomasi koersif. Seperti dalam *The Handbook of Diplomacy*, dikatakan bahwa penggunaan militer dalam bentuk ancaman dan/atau pemaksaan untuk membantu proses negosiasi dalam diplomasi.¹⁴ Dengan konsep awal tersebut memberikan ciri khas kepada diplomasi koersif yakni negosiasi yang didampingi oleh kekuatan militer dalam bentuk ancaman. Meskipun demikian, diplomasi koersif tetap memiliki tujuan yang sama dengan tipe-tipe diplomasi lainnya yakni menggunakan jalur negosiasi dengan sebaik-baiknya sehingga muncul keputusan untuk bekerja sama.¹⁵

Dengan ciri khasnya yang didampingi oleh kekuatan militer, diplomasi koersif seringkali digunakan pada isu-isu khusus yang mendesak salah satunya dalam isu konflik atau peperangan. Dalam konseptualisasi yang diformulasikan oleh Peter Viggo Jakobsen, diplomasi koersif disandingkan dengan *blackmail* yang merupakan condong kepada peran pro-aktif militer dalam menghadapi suatu isu seperti yang ada pada bagan di bawah ini:

¹⁴ Constantinou, C., Kerr, P., & Sharp, P. (2016). *The SAGE handbook of diplomacy*. London: SAGE Publication.

¹⁵ Ibid.

Gambar 1. 1 Konseptual Diplomasi Koersif



Sumber: Constantinou, Kerr, & Sharp (2016)

Dari gambar diatas juga dapat dipahami bahwa tujuan diplomasi koersif adalah untuk menghentikan atau membatalkan tindakan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh negara target. Hal ini tetntu berbeda dengan *blackmail* yang bertujuan untuk menginisiasi aksi selanjutnya yang dilakukan oleh negara target.

Tujuan tersebut tentunya akan diupayakan oleh negara dengan formulasi kebijakan ataupun arah negosiasi yang tepat. Dari era tradisional tadi tentu akan berbeda dengan masa-masa modern yang memperluas aspek-aspek yang ada di dalam sistem internasional. Pada saat ini hampir tidak mungkin negara tidak melibatkan aspek ekonomi dalam setiap interaksinya dengan negara lain, baik dalam bentuk tujuan ataupun sebab-akibat terjalannya interkasi. Oleh karena itu penulis menggunakan teori diplomasi koersif yang telah melibatkan instrumen-instrumen ekonomi di dalamnya yang dipublikasikan oleh Perez dalam bukunya

yang berjudul *Coercive Diplomacy in the 21st Century: A New Framework for the "Carrot and Stick"*. Perez berpendapat bahwa teori diplomasi koersif dapat memuat strategi multi aspek yang meliputi pendekatan diplomatik, ekonomi dan militer.¹⁶ Masuknya multi-aspek ini dikarenakan dibutuhkannya penjagaan terhadap konfrontasi diplomatik khususnya dalam ancaman perang. Dengan demikian, dalam situasi krisis dibutuhkan pembuatan kebijakan ekonomi yang dapat memformulasikan strategi untuk manajemen dan menghentikan krisis tersebut tanpa adanya erupsi konflik kekerasan ataupun peperangan.¹⁷

Dalam diplomasi koersif terdapat empat variabel utama yang terlibat diantaranya yakni (a) *the demand*, atau permintaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk menghadapi negara targetnya; (b) *the means used for creating a sense of urgency*; (c) *the threatened punishment for noncompliance*, dengan kata lain negara juga harus mempersiapkan hukuman untuk negara target apabila tidak memenuhi permintaanya; dan (d) *the possible use of incentives*.¹⁸ Kemudian dalam diplomasi koersif juga terdapat tipe-tipe yang berbeda seperti yang ada di gambar ini:

¹⁶ Perez. (2015). *Coercive Diplomacy in the 21st Century: A New Framework for the "Carrot and Stick"* [University of Miami].

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

Gambar 1. 2 Elemen dan tipe-tipe diplomasi koersif

Theoretical Elements	Types of Coercive Diplomacy
<ul style="list-style-type: none"> ✦ Four basic variables <ul style="list-style-type: none"> ▣ The demand ▣ The means used for creating a sense of urgency ▣ The threatened punishment for noncompliance ▣ Possible use of incentives 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Ultimatum ✦ Tacit ultimatum ✦ "Try & see" approach ✦ Gradual turning of the screw ✦ "Carrot and stick approach"

Sumber: Perez (2015)

Menurut George yang dirangkum oleh Perez, tipe-tipe diplomasi koersif terbagi menjadi lima tipe yakni (a) *Ultimatum*; (b) *Tacit Ultimatum*; (c) "*Try & See*" *Approach*; (d) *Gradual turning of the screw*; dan (e) "*Carrot & Stick Approach*". Tipe yang pertama yakni *Ultimatum* yang berisikan permintaan atau *demand*, diikuti dengan pembatasan waktu untuk negara target merespon permintaan tersebut dan dilengkapi juga dengan ancaman hukuman yang kuat dan kredibel untuk ketidakpatuhan.¹⁹ Dalam tipe ini, penekanan koersif sangat ditekankan melalui *coercion* atau paksaan terhadap negara target agar mengikuti *demand* yang dikeluarkan sebelumnya. Strategi *full fledged ultimatum* ini sangat relevan dengan fungsi diplomasi koersif yang diluncurkan oleh negara-negara bersifat paten terhadap kebijakannya, dengan kata lain tidak ada fleksibilitas atau negosiasi kembali mengenai keputusan awal.

Kemudian tacit ultimatum merupakan versi lebih ringan dari ultimatum yakni lebih banyak strategi yang dilakukan secara implisit dan bukan eksplisit.

¹⁹ Jack S. Levy (2008). The Enduring Legacy of Alexander L. George: A Symposium || Deterrence and Coercive Diplomacy: The Contributions of Alexander George. *Political Psychology*, 29(4), 537–552. doi:10.2307/20447143

Yang ketiga yakni *try & see*, dimana tidak ada pembatasan waktu dari pelimpahan permintaan kepada negara target. *Gradual turning of the screw*, merupakan strategi yang melibatkan ancaman peningkatan tekanan koersif dengan waktu yang lebih lama dari strategi diplomasi koersif ultimatum. Dan yang terakhir adalah *carrot & stick approach*, pendekatan ini juga dipopulerkan oleh Alexander L. George namun telah banyak diperbarui oleh banyak peneliti hubungan internasional dan dinilai sebagai strategi dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi terlebih jika konsepsi *carrot* lebih tinggi dibandingkan pendekatan *stick*. Secara harfiah, wortel dan tongkat merupakan perumpamaan kebijakan bilateral ataupun multilateral yang digunakan untuk melambangkan *prize* dan *punishment*. Konsep ini berawal dari teori motivasi tradisional, yang menekankan bahwa hanya ada dua pilihan bagi penerima *carrot & stick* yakni hadiah atau hukuman. Apabila dibawa ke diplomasi koersif hal ini sama seperti pendekatan ultimatum akan tetapi ditambahi dengan instrumen *reward*.²⁰

Dengan masuknya aspek ekonomi dalam diplomasi koersif dibutuhkan kebijakan yang dapat mewartakan hal tersebut. Perez mengemukakan salah satu bentuk kebijakan yang dapat dimasukkan dalam upaya negara melakukan langkah diplomasi koersif yakni sanksi ekonomi atau embargo. Sanksi ekonomi dalam diplomasi koersif diyakini merupakan salah satu jalan untuk memperlancar usaha negara membujuk targetnya menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar yurisdiksi maupun hukum internasional atau membatalkan kebijakan yang sudah

²⁰ Ibid.

dilakukan.²¹ Harapan dari dilakukannya sanksi ekonomi tentunya terbentuk resolusi perdamaian, meskipun dengan cara yang koersif. Untuk memperjelas mengenai kebijakan sanksi ekonomi, penulis telah merangkum teori-teori mengenai sanksi ekonomi guna menjelaskan secara merinci mengenai apa, mengapa dan bagaimana sanksi ekonomi digunakan.

1.4.1.2 *Economic Sanctions Theory*

Dalam mengarungi sistem internasional yang bersifat anarki dengan dasar banyaknya konflik yang ada, dibutuhkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan negara. Kebijakan negara juga memiliki segmentasi yang berbeda-beda, seperti kebijakan domestik dan internasional. Kedua jenis kebijakan ini meskipun cakupannya berbeda akan tetapi sering kali dapat bersinggungan langsung. Dalam konteks globalisasi ekonomi dan keamanan negara, terdapat *economics sanctions* yang digunakan sebagai salah satu terobosan kebijakan dalam merespon suatu konflik dan berhubungan langsung dengan negaranya.²² Dengan demikian, kebijakan ini akan masuk ke ranah *foreign economic policy* yang dianut negara sebagai anti-tesis dari kebijakan ekonomi luar negeri normal.

Dalam perkembangannya, sanksi ekonomi telah diimplementasikan oleh banyak negara sebagai kebijakan luar negerinya mulai dari tahun 1970-an. Dari tercetusnya kebijakan ini, terlihat juga bagaimana peran sanksi ekonomi yang berubah menjadi kian signifikan di kontestasi politik internasional. Hal ini

²¹ Ibid.

²² Filipenko, A., Bazhenova, O., & Stakanov, R. (2020). ECONOMIC SANCTIONS: THEORY, POLICY, MECHANISMS. *Baltic Journal Of Economic Studies*, 6(2), 69-80. doi: 10.30525/2256-0742/2020-6-2-69-80

dibuktikan dengan data yang ada menunjukkan antara tahun 1975 hingga 2005 saja terdapat 1095 sanksi baru yang dikeluarkan untuk 164 negara.²³ Secara aspek yang dituju, sanksi ekonomi secara jelas merupakan kebijakan yang menghindari ikut campurnya intervensi militer dalam menghadapi suatu fenomena internasional. Sehingga dapat dipahami apabila sanksi ekonomi memiliki definisi sebagai tindakan ancaman atau tindakan pembatasan yang nyata dalam bidang ekonomi. Tujuan dari adanya sanksi ekonomi ini tidak lain adalah untuk memaksakan perubahan yang berhubungan dengan perilaku negara.

Beralihnya sanksi ekonomi ini menjadi suatu teori ditandai dengan munculnya instrumen-instrumen yang mendasari perilaku negara ketika mengeluarkan sanksi.²⁴ Instrumen tersebut di antaranya yakni yang pertama sanksi melibatkan setidaknya satu aktor yang menyanksi dan satu aktor lainnya yang terkena sanksi. Secara sederhana, dalam sanksi ekonomi harus ada *sender* yang merupakan aktor pencetus sanksi dan *target* sebagai penerima sanksi. Akan tetapi, jumlah aktor yang termasuk sender dan target tersebut tidak harus satu aktor namun dapat lebih dari satu dengan istilah sanksi bilateral atau sanksi multilateral. Kemudian yang kedua, tentunya sanksi ekonomi harus membatasi atau menghentikan hubungan ekonomi antar negara *sender* dan *target* yang didalamnya termasuk perdagangan, finansial, dan bantuan luar negeri.²⁵ Dan yang terakhir, sanksi ketika diberlakukan harus ditemani dengan permintaan perubahan dari negara *sender* yang digunakan untuk upaya merubah kebijakan yang telah

²³ Kobayashi, Yoshiharu. (2018). Economic Sanction as Foreign Policy. 10.1093/acrefore/9780190228637.013.477.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

dikeluarkan sebelumnya oleh negara *target*.²⁶ Dalam hal ini permintaan perubahan tersebut dapat berasal dari berbagai macam aspek seperti perubahan dalam kebijakan perdagangan, isu lingkungan, kebijakan yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM), dan tentunya mencegah tindakan militer negara *target*.

Sebagai kebijakan yang hanya sering digunakan oleh negara dengan kapasitas investasi yang sangat luas, tentunya akan berdampak pada banyak hal di sisi domestik maupun internasional. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kebijakan ini memiliki pengaruh yang sangat kompleks dalam pengaplikasiannya. Akan tetapi sebelum membahas hal tersebut, penulis perlu menjelaskan mengenai bagaimana teori ini berkembang serta mekanismenya dalam sistem internasional. Terdapat dua pendekatan dalam pengemasan teori sanksi ekonomi, di antaranya adalah dua teori tradisional yakni liberalisme dan realisme.²⁷ Dari kedua pendekatan mendasar tersebut terdapat dua turunan lagi dari masing-masing pembentuk teori di antaranya yaitu kosmopolitanisme (konsepsi liberal) dan hegemonisme (cabang dari realisme).²⁸

Apabila melihat dari sisi liberalisme kebijakan yang diambil sudah dapat dipastikan akan mengarah kepada kerjasama. Dalam arti lain kebijakan ekonomi akan bertujuan untuk merealisasikan *free trade* dan *free market*. Kemudian, jika melihat teori sanksi ekonomi dari arah sebaliknya atau dari kaca mata realisme

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Filipenko, A., Bazhenova, O., & Stakanov, R. (2020). ECONOMIC SANCTIONS: THEORY, POLICY, MECHANISMS. *Baltic Journal Of Economic Studies*, 6(2), 69-80. doi: 10.30525/2256-0742/2020-6-2-69-80

²⁸ *Ibid.*

maka kebijakan tersebut akan lebih condong ke sifat koersif.²⁹ Dengan anggapan bahwa sistem dunia bersifat hegemonik dengan mengikutsertakan aspek-aspek negara seperti ekonomi, politik, teknologi, dan militer maka tercipta kebijakan yang digunakan untuk mencapai hegemoni ataupun melawan hegemoni yang telah ada sebagai tindakan *survival*.

Setelah mengetahui mengenai asal dari teori sanksi ekonomi, maka didapatkan kesimpulan bahwa ada dua tipe utama kebijakan ekonomi dalam lingkup hubungan ekonomi internasional. Kedua tipe tersebut di antaranya, yakni (a) kebijakan yang bertujuan menegatkan dan penataan sebagai bentuk pengaplikasian penegakkan hukum internasional dalam lingkup ekonomi dan (b) kebijakan yang dirumuskan berdasarkan interpretasi situasi politik dan ekonomi.³⁰ Dari tipe utama tersebut, didapatkan tiga jenis kebijakan untuk memberikan sanksi ekonomi ke negara lain, di antaranya yakni perdagangan, investasi atau finansial dan sanksi yang ditargetkan atau banyak yang menyebutnya *smart sanctions*.³¹ Untuk lebih mudah memahaminya terdapat tabel yang dituliskan oleh Filipenko dkk. mengenai tipe sanksi ekonomi:

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Filipenko, A., Bazhenova, O., & Stakanov, R. (2020). ECONOMIC SANCTIONS: THEORY, POLICY, MECHANISMS. *Baltic Journal Of Economic Studies*, 6(2), 69-80. doi: 10.30525/2256-0742/2020-6-2-69-80

³¹ *Ibid.*

Gambar 1. 3 Tipe Sanksi Ekonomi

Positive sanctions	Negative sanction
Existing or promised gains	Existing or threatening penalties
<u>Trade sanctions:</u> – Tariff reduction – Tariff elimination	– Partial embargo – Absolute embargo
<u>Investment or financial sanctions:</u> – Financial or investment assistance from various institutions such as the IMF, the WB or from countries	– Reduction of capital flows (<i>lending reduction or suspension</i>) – Forced disinvestment – Reduction in international payments – Assets freezing
<u>Targeted sanctions:</u> – Humanitarian aid	– Transport and communications ban – Travel ban – technology transfer ban, IPR transfer ban

Sumber: Filipenko, et al. (2020)

Setelah mengetahui alur yang digunakan dalam memberikan sanksi ekonomi, selanjutnya dalam teori saksi ekonomi ini juga memberikan penjelasan mengenai area mana saja yang dapat mengimplementasikan sanksi tersebut. Dalam publikasinya Filipenko dkk. mengidentifikasi menjadi Sembilan hal di antaranya adalah: (1) Budaya dan olahraga, dimana sanksi akan mengutamakan tindakan-tindakan yang dirasa perlu dalam ranah budaya dan olahraga seperti penangguhan pertukaran budaya; (2) Diplomasi, meliputi penghentian misi diplomatik, pengusiran dari organisasi internasional dan larangan menjabat; (3) Transportasi, tindakan yang diambil seperti larangan interaksi udara dan laut begitun juga dengan penghentian segala akses transportasi termasuk kereta api maupun yang berada di jalan raya; (4) Komunikasi, seperti penghentian layanan pos dan sarana telekomunikasi lainnya; (5) Kerjasama pembangunan, meliputi penghentian pendampingan finansial dan segala bentuk teknisnya; (6) Isu militer, dapat diberlakukan melalui pemberhentian kerjasama militer baik perjanjian yang

akan datang maupun yang telah ada; (7) Finansial, meliputi pembekuan segala jenis aset yang dimiliki negara yang dikenai sanksi dan larangan untuk melakukan segala bentuk transaksi finansial; (8) Perdagangan, melakukan pemboikotan dan embargo dagang antar negara; dan (9) Peradilan pidana atau *criminal justice* yang akan melibatkan pengadilan internasional demi dikenakannya sanksi yang lebih lanjut.

Setelah membahas mengenai sanksi secara garis besar, hal tersebut pastinya juga tidak lepas dari hasil atau *outcomes*. Filipenko dkk. dalam artikelnya beranggapan bahwa dikenakannya sanksi ekonomi pasti akan berimbas pada aspek sosio-ekonomi seperti pemberlakuan sanksi perdagangan yang pastinya akan berdampak langsung terhadap kehidupan suatu populasi dan juga perkembangan ekonominya.³² Dengan melihat variabel yang berdampak dari asumsi tersebut didapatkan hasil-hasil yang dapat terjadi ketika sanksi telah diluncurkan sebagai kebijakan ekonomi luar negeri suatu negara. Hasil-hasil tersebut terbagi menjadi empat yakni (a) pentingnya preferensi aktor untuk memahami permainan sanksi sangat penting terlebih juga pengertian mengenai masalah yang disengketakan dan pengenaan sanksi itu sendiri; (b) sanksi dengan sifat untuk mengancam merupakan hal penting yang digunakan untuk menjalankan strategi agar terdapat perubahan perilaku dari negara tersanksi; (c) negara yang tidak menghiraukan ancaman yang ada dalam sanksi akan lebih sulit untuk merubah perilakunya; dan (d) meskipun negara yang ditargetkan tidak

³² Filipenko, A., Bazhenova, O., & Stakanov, R. (2020). ECONOMIC SANCTIONS: THEORY, POLICY, MECHANISMS. *Baltic Journal Of Economic Studies*, 6(2), 69-80. doi: 10.30525/2256-0742/2020-6-2-69-80

mengindikasikan perubahan, sanksi tersebut tetap dapat dikatakan berhasil dilihat dari reputasi dan *rating* politik negara yang koersif.³³

1.4.1.2.1 *Assets Freeze*

Ketika menjelaskan mengenai sanksi yang dijatuhkan oleh negara *sender*, salah satu aspek yang seringkali digunakan adalah sanksi berupa pembekuan aset atau *assets freezing*. Untuk memahami bagaimana kaitannya pembekuan aset ini dengan perubahan kebijakan sebagai tujuan sanksi diperlukan penjelasan mengenai *Outward* FDI. Menurut The World Bank, *Outward* FDI merupakan FDI yang diluncurkan suatu negara (dengan medium yang berbeda-beda) termasuk dalam bentuk aset dan *liabilities* yang dibeli untuk keperluan investasi atau menghasilkan pemasukan untuk investornya.³⁴ Tentunya aset dalam pembahasan ini berlokasi di luar domisili investor, yang kemudian dapat disebut juga sebagai *direct investment abroad* atau investasi luar negeri.

Kemudian apabila membahas mengenai sanksi dan aset diperlukan pemahaman mengenai penjelasan apa itu pembekuan aset. Dalam publikasi yang ditulis oleh United Nations Security Council (UNSC), penjelasan pertama adalah mengenai tujuan dan pihak-pihak yang terkena pembekuan aset. Dalam resolusi nomor 2161 tahun 2014 berbunyi:

“Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of these individuals, groups, undertakings and entities, including funds derived from property owned or

³³ *Ibid.*

³⁴ The World Bank. (2022). What is the difference between Foreign Direct Investment (FDI) net inflows and net outflows? – World Bank Data Help Desk. Diakses pada 6 April 2022 dari <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/114954-what-is-the-difference-between-foreign-direct-inve>.

*controlled directly or indirectly, by them or by persons acting on their behalf or at their direction, and ensure that neither these nor any other funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for such persons' benefit, or by their nationals or by persons within their territory.*³⁵

Dari isi resolusi PBB di atas dapat diketahui bahwa semua entitas yang berkaitan dengan pengaliran dana kepada negara tersanksi akan terkena pembekuan aset. Objektif pembekuan aset tersebut bertujuan untuk menghalau individu, kelompok atau entitas dari pendanaan guna mendukung kebijakan atau tindakan yang melanggar hukum internasional.³⁶ Tentunya pengenaan pembekuan aset ini telah melalui proses penyaringan untuk mengetahui siapa saja yang benar-benar melakukan pendanaan kepada negara tersanksi. Masuknya para aktor pada daftar tersangka ini tentu harus dipayungi dasar hukum domestik dan internasional yang jelas untuk menghindari kesalahan yang selanjutnya akan berdampak buruk kepada negara *sender*.

Dalam publikasi yang dikeluarkan oleh UNSC ini juga menyebutkan hal-hal mana saja yang termasuk aset, di antaranya seperti tanah, bangunan, kendaraan, komoditas, merek dagang, hak cipta, *hosting* internet, persenjataan, dan aset-aset lainnya. Aset yang disebutkan sebelumnya dapat disebut juga sebagai sumber perkenomian investor atau *economic resources*. Sumber-sumber tersebut juga tidak terbatas oleh siapa yang mengontrol aset tersebut, jadi baik dikontrol secara langsung atau tidak langsung oleh pemilik aset maka akan tetap masuk kedalam daftar aset yang dibekukan.³⁷ Penjelasan mengenai aset oleh

³⁵ UNSC. (2015). ASSETS FREEZE: EXPLANATION OF TERMS. UNSC.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

UNSC ini tentunya akan menjadi pedoman bagi negara-negara yang akan menjatuhkan sanksi pembekuan aset dan dapat ditambahkan juga dengan pengertian lain dengan yuridiksi yang ada. Hal ini yang kemudian dapat mengubah persepsi sanksi ekonomi yang sebelumnya menjauhkan warga negara target dari kemiskinan menjadi lebih terarah kepada oligarki negara yang memengaruhi kebijakan.

1.4.1.2.2 *Forced Disinvestments*

Bentuk sanksi kedua yang akan penulis gunakan untuk menganalisis studi kasus penelitian adalah *forced disinvestments* atau dengan kata lain penarikan investasi secara paksa oleh pihak di luar investor. Secara definisi, *forced disinvestment* tentunya berbanding terbalik dengan kata investasi atau tindakan FDI. Disinvestment secara proses akan melalui beberapa tahap yang dilakukan oleh negara *host* sebagaimana negara tersebut yang memegang yurisdiksi.

Tahapan disinvestasi paksa yang pertama adalah pemberitahuan pemerintah kepada investor atau pemilik saham investasi tentang langkah apa yang akan diambil pemerintah tuan rumah kepada produk investasinya. Dalam pemberitahuan ini terbagi menjadi lima macam, di antaranya yakni (1) *Announcements of nationalization*; (2) *Announcements of expropriation*; (3) *Occupations*; (4) *Threats to expropriate or nationalize*; (5) *Transitory revocation of permit*.³⁸ Pemberitahuan ini dibedakan dengan alasan mendasar mengapa negara *host* akan mengeluarkan investor terkait dari negaranya. Alasan tersebut di

³⁸ Ochoa, D., & Pena, J. (2020). The Impact of Forced Divestments on Parent Company Stock Prices: Buy on the Rumor, Sell on the News?. *Research In International Business And Finance*, 4-5. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101175>

antaranya adalah nasionalisasi perusahaan (terdapat proses jual beli), pengambilalihan perusahaan (kemungkinan besar tanpa kompensasi), intervensi bisnis oleh negara *host*, ancaman nasionalisasi atau ambil alih, dan pencabutan izin perusahaan.

Kemudian setelah tahapan pemberitahuan, negara akan melakukan kebijakan disinvestasi paksa kepada perusahaan atau investor. Tindakan negara di sini terbagi menjadi dua di antaranya (a) penjualan paksa (*forced sales*) dan (b) penyitaan aset (*asset seizures*).³⁹ Pada penjualan paksa, umumnya negara *host* akan mengeluarkan publikasi dalam bentuk perjanjian dengan pihak perusahaan atau investor. Apabila negara melakukan langkah ini yang diambil oleh negara maka perusahaan akan menerima kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disetujui di awal jual-beli. Kemudian terdapat langkah kedua yakni penyitaan aset atau *asset seizures*, yang mana terdapat keputusan unilateral dari negara *host* untuk mengambil kontrol penuh atas produk investasi yang ada tanpa adanya kompensasi kepada investor. Dalam penyitaan ini terbagi menjadi dua jenis yakni: (1) *Outright expropriations*, dalam kasus ini pemerintah akan menyita aset tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Akan tetapi dalam model ini, pihak perusahaan dapat meminta kompensasi melalui langkah hukum di pengadilan atau litigasi; dan (2) *Permanent revocation of permits*, dalam kasus ini perusahaan akan mendapatkan *license* untuk melanjutkan

³⁹ *Ibid.*

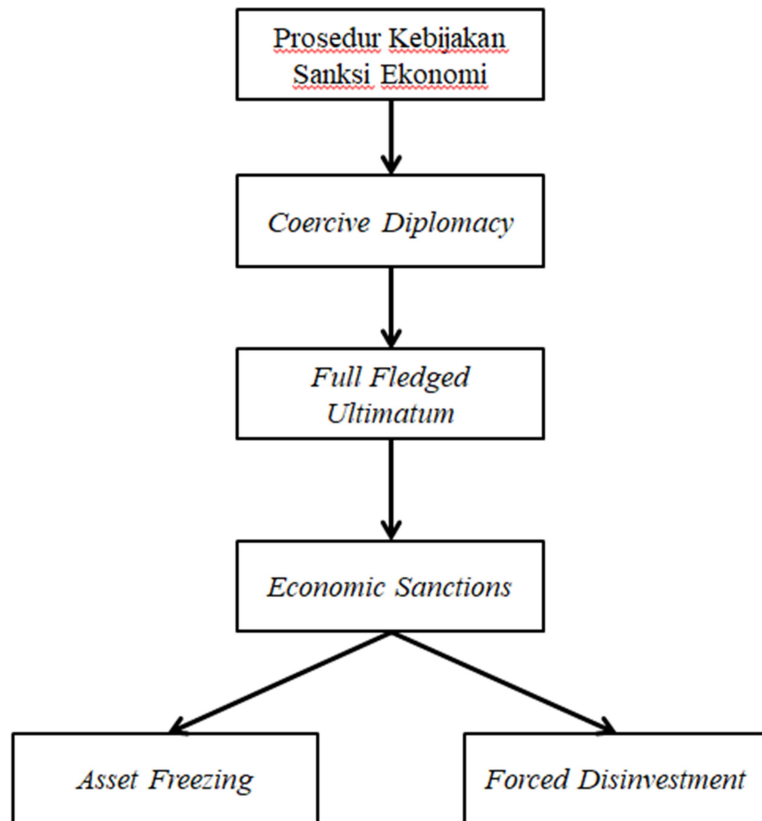
pengoperasian perusahaan dalam batas waktu tertentu. Namun, kepemilikan akantetap diambil alih oleh pemerintah setempat.⁴⁰

Dari kedua tipe tersebut, tujuannya tetap sama yakni penyitaan aset secara paksa tanpa kesepakatan dengan perusahaan atau investornya. Penjelasan ini tentunya akan mengerucutkan pengaruh atau dampak yang akan diterima oleh pelaku FDI ketika diberlakukannya sanksi oleh negara *host*.

⁴⁰ *Ibid.*

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1. 4 Sintesa Pemikiran



Guna mengetahui bagaimana prosedur sanksi ekonomi, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep yang terbagi menjadi empat bagian. Dari keempat bagian tersebut yang pertama yakni teori diplomasi koersif yang ditulis pertama kali oleh Alexander L. George dan diperbarui oleh Jack S. Levy. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa dalam mengarungi sistem internasional dibutuhkan alat untuk mewujudkan kebijakan luar negeri ataupun *national security goals*. Oleh karenanya diplomasi koersif hadir untuk mewujudkan cita-

cita tersebut, khususnya dalam situasi dan kondisi yang mendesak seperti dalam merespon terjadinya konflik yang berhubungan dengan negara baik dari *soft power* maupun *hard power*-nya. Diplomasi koersif memiliki ciri khas yakni dengan mengancam negara target dan memberi hukuman apabila tidak ada indikasi *compliance*. Salah satu alur diplomasi koersif adalah melalui *full fledged ultimatum* yang secara sederhana berisikan *demand* atau permintaan, *time limit* atau pembatasan waktu untuk mematuhi, dan yang terakhir yakni *sanctions*.

Setelah melewati fase-fase tersebut dan tidak ada tanda-tanda kepatuhan, maka dijatuhkannya sanksi dapat menjadi realita. Salah satu jenis sanksinya adalah sanksi ekonomi yang dapat dianalisis menggunakan teori sanksi ekonomi yang dikemukakan oleh Filipenko et. al. Dalam teori sanksi tersebut dijabarkan bahwa terdapat prosedur yang panjang ketika ingin menjatuhkan sanksi ekonomi diantaranya yakni mengidentifikasi negara target, menentukan ranah-ranah sanksi dan jenisnya, memperhitungkan *outcomes* dari sanksi, dan terakhir pemberian sanksi. Dalam tahapan-tahapan ini, apabila dibedah secara teknis maka proses penentuan jenis sanksi dan pemberiannya memakan proses terlama.

Dalam isu-isu yang melibatkan bisnis internasional, teori sanksi ekonomi menjelaskan bahwa terdapat jenis sanksi yang bisa mencakup lini bisnis dan rezim diantaranya yakni *asset freezings* dan *forced disinvestment*. Kedua hal tersebut masuk dalam ranah finansial yang dapat diintervensi oleh negara *sender*. Kegunaan dari dua jenis sanksi tersebut adalah tidak lain untuk mencegah sumber-sumber ekonomi untuk masuk ke tangan rezim yang kemudian digunakan untuk keperluan melawan hukum internasional.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan pada latar belakang masalah, teori dan sintesa pemikiran, peneliti memiliki beberapa argumen utama untuk menjawab rumusan masalah yang ada yakni “Bagaimana prosedur pemberian sanksi ekonomi oleh Britania Raya kepada Rusia dalam konflik Rusia-Ukraina tahun 2022?”. Pertama, penulis berpendapat bahwa dalam menjatuhkan sanksi pemerintah UK memerlukan dasar hukum domestik yang jelas yang juga dapat selaras dengan *national interest* dalam perwujudan kebijakan luar negerinya. Hal ini merupakan prosedur dasar dari adanya sanksi, dan telah dirumuskan bahwa dalam menyikapi konflik UK menggunakan diplomasi koersif dan didukung oleh kombinasi undang-undang “*Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (Sanctions Act)*”.

Kemudian dari dasar hukum dan dasar kebijakan luar negeri tersebut, prosedur dijatuhkannya sanksi diturunkan ke lembaga terkait yakni Foreign, Commonwealth Office (FCDO) and Development, National Crime Agency (NCA) dan *Her Majesty's Treasury* (HM Treasury) dengan anak lembaga yakni *Office of Financial Sanctions Implementation* (OFSI). Lembaga ini akan bertanggung jawab dalam implementasi sanksi ekonomi UK dan segala dinamika di dalamnya. Dalam lembaga-lembaga tersebut juga akan menentukan mengenai tipe sanksi yang akan digunakan, diantaranya yakni *targeted asset freezes* dan *investment bans*.

Setelah menentukan tipe sanksi yang digunakan, pemerintah UK melalui lembaga-lembaganya membuat daftar nama-nama atau *Consolidated List* yang harus patuh terhadap sanksi. Individu dan kelompok yang memiliki keterkaitan

akan disebut sebagai *designated persons* dengan dasar yang dikeluarkan oleh *UK autonomous financial sanctions legislation* dan *UN sanctions*. Dengan daftar nama ini, pemerintah UK dapat dengan mudah melacak dan menggunakan otoritasnya untuk penjatuhan sanksi. Akan tetapi, pemerintah UK akan memberikan hal-hal yang terkait dengan *full fledged ultimatum* kepada Rusia untuk memberikan kejelasan atas hukum-hukum yang akan diberlakukan. Ultimatum ini dijabarkan oleh PM Boris melalui konferensi pers langsung dan juga melalui siaran pers tertulis. Di dalamnya tentu akan memuat *demand*, *time limit*, dan sanksi yang akan diberlakukan apabila Rusia dan entitasnya tidak mematuhi.

Dalam studi kasus Chelsea Football Club, ultimatum tersebut telah melewati batas yang ditentukan sehingga pemilik klub sepak bola tersebut yakni Roman Abramovich dikenai sanksi. Sanksi tersebut meliputi pembekuan aset dan larangan investasi, yang mana apabila aset tersebut tidak dijual maka akan terdapat sanksi susulan pada Chelsea FC. Akan tetapi karena dijatuhkannya sanksi oleh UK bertepatan dengan berjalannya kompetisi domestik dan internasional maka terdapat prosedur *operating license* yang memberikan kelonggaran terhadap bisnis internasional seperti Chelsea FC tetap beroperasi dengan syarat-syarat yang berlaku. Akan tetapi dari syarat-syarat yang berlaku tersebut mengacu kepada resiko-resiko bisnis yang dapat berakhir dengan kebangkrutan. Maka dari itu penulis beragumen bahwa *operating licence* juga berperan dalam sanksi *forced disinvestment* dengan bentuk penjualan paksa demi menyelamatkan bisnis domestik Chelsea FC.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Guna menjawab rumusan masalah yang ada hingga menganalisis data yang ada diperlukan adanya metodologi penelitian. Oleh karena itu, untuk memudahkan penulis dalam merancang penelitian hingga akhir diperlukan metodologi yang tepat sehingga rumusan masalah dapat terpecahkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴¹ Tujuan dari digunakannya metode deskriptif yakni untuk mengetahui gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Penulis memilih metode deskripsi dengan tujuan untuk mengkaji Prosedur sanksi ekonomi UK terhadap Rusia serta hubungannya dengan aset FDI Rusia di UK seperti Chelsea FC. Penulis juga ingin memberikan gambaran mengenai fenomena kebijakan sanksi ekonomi dalam merespon terjadinya konflik sehingga pada akhir penulisan dapat diambil makna dari analisis yang ada. Tujuan ini juga berhubungan dengan ciri metode deskriptif yakni:⁴² (a) penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya; (b) dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara

⁴¹ M. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

⁴² A Furchan, 2004, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 54.

cermat; (c) tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan; dan (d) tidak adanya uji hipotesis

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan dan analisis dalam penelitian ini lebih bisa berfokus, penulis menggunakan batasan waktu penelitian serta pengambilan data. Rentang waktu penelitian ini dimulai dari tahun 2018-2022 yang mana pada rentang waktu tersebut terdapat fenomena penting berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Pada tahun 2019 merupakan awal dari UK untuk memberikan sanksi kepada Rusia dengan diluncurkannya *The Russia Regulations 2019*. Regulasi tersebut dirancang melalui proses amandemen yang panjang sehingga dapat beroperasi penuh pada 31 Desember 2020. Kemudian pada tahun 2022, sanksi ekonomi berskala besar dirilis dan diimplementasikan oleh pemerintah UK demi merespon terjadinya tindakan berindikasi invasi oleh pemerintah Rusia kepada Ukraina. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa rentang tahun tersebut perlu diteliti lebih lanjut.

17.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini tidak lain adalah penghimpunan data secara kualitatif. Secara umum, penelitian kualitatif dibagi menjadi empat jenis yakni: riset berdasarkan dokumen dan arsip, wawancara, *focus groups*, dan riset internet.⁴³ Pada penelitian ini penulis akan menggunakan data-data berjenis sekunder yang ada pada internet,

⁴³ Christopher Lamont, *Research Methods in International Relations*, (London: Sage, 2015), hal. 80-91.

berita ataupun laporan yang dirilis oleh lembaga-lembaga yang dapat dipercaya seperti *press release* dari pemerintah Britania Raya dan Chelsea Football Club sebagai studi kasus utama.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data sekunder yang telah penulis himpun, diperlukan teknik analisis data yang sesuai. Terdapat dua jenis teknik atau metode untuk menganalisis data, di antaranya yakni metode kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini yang bersifat deskriptif. Pemilihan ini berhubungan dengan pemilihan tipe penelitian deskriptif yang membutuhkan jawaban yang kompleks dan konkret meskipun menyangkut proses politik dan sosial.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan pemetaan dari tulisan ini. Berikut ini adalah garis besar dari penelitian ini:

Bab I berisi mengenai latar belakang beserta hal-hal yang mendasar mengenai fenomena yang akan penulis teliti. Dasar-dasar tersebut meliputi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori dan konseptual, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metodologi penelitian.

Bab II berisi tentang latar belakang munculnya sanksi ekonomi yang diluncurkan oleh UK serta sejarah yang berhubungan dengan sanksi ekonomi.

Dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan mengenai konflik Rusia-Ukraina dan Britania Raya sebagai pihak ketiga.

Bab III menjelaskan mengenai analisis penulis mengenai prosedur kebijakan ekonomi luar negeri Britania Raya dalam merespon konflik Rusia-Ukraina yang berhubungan langsung pada jalannya bisnis internasional Chelsea Football Club sebagai penerima FDI Rusia. Pada bagian ini juga akan dijelaskan mengenai relevansi antara hukum domestik yang merambah ke hubungan bilateral antar negara.

Bab IV berisikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya beserta saran penulis.